



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN  
KOMISI X DPR RI  
(PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA  
DAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK)  
KE KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA  
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022  
TANGGAL 13 S.D. 15 JUNI 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI berfokus pada Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Pada Masa Sidang V 2021-2022, sesuai dengan hasil Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 17 Mei 2022, Komisi X DPR RI akan melakukan kunjungan kerja spesifik pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan Kota Palembang Sumatera Selatan pada 13 s.d. 15 Juni 2022.

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. SKB 4 (empat) Menteri Nomor 06/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
8. Keputusan Mendikbudristek RI Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.
9. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 17 Mei 2022.

## **B. Tujuan**

Mengacu pada persoalan di atas, maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang pendidikan ke Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah untuk melihat secara langsung penyelenggaraan perkembangan PTM secara terbatas, dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PSP sesuai Kepmendikbudristek RI Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

## **C. Tim Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Bagian TVR Parlemen, serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (A-185/Fraksi PDI Perjuangan).

## **D. Jadwal Kunjungan Kerja**

Pertemuan dengan Bupati Kabupaten Deli Serdang, H. Ashari Tambunan, yang antara lain dihadiri oleh:

1. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Citra Effendi Capah. M.SP.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Yudy Hilmawan, MM.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Muriadi.
5. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sabirin dan Idris.
6. Ikatan Guru Indonesia (IGI), Suwito Setiadi.
7. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Mahmud dan Aisyah Hasibuan.
8. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Saudara Fahriza.
9. Perwakilan dari Komite Sekolah:
  - a. SDN 101900 Lubuk Pakam.
  - b. SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan.
10. Perwakilan Kepala Sekolah:
  - a. Sekolah Dasar, Yusniati dan Mariana.
  - b. Sekolah Menengah Pertama, Risna dan Irwansyah.
  - c. Taman Kanak-Kanak, Rahmaini.

## **II. TEMUAN DATA**

1. Upaya Pemerintah Daerah Deli Serdang dalam menyelenggarakan belajar dari rumah selama masa pandemi, antara lain melalui Surat Edaran Nomor 218/GT Covid-19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang larangan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyusun SOP Pelaksanaan Pembelajaran selama Masa Pandemi Covid-19, membuat surat edaran perihal Pembelajaran Jarak Jauh/BDR, menyiapkan modul belajar cetak maupun elektronik, dan menetapkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah, yaitu pembelajaran daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan *home visit* (kunjungan rumah).

2. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi *learning loss* di satuan pendidikan dengan:
  - a) menggunakan kurikulum darurat dengan berfokus pada materi yang esensial;
  - b) melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendalaman materi pokok yang merupakan materi prasyarat untuk materi berjenjang;
  - c) ciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan;
  - d) melakukan penilaian berbasis literasi dan numerasi.
  
3. Persiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dilakukan antara lain menetapkan Instruksi Bupati Nomor 440/2839 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Dease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 2019. Menyusun SOP Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan mempedomani Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi.
  
4. Kendala yang ditemui dalam rencana PTM, antara lain kurangnya kesadaran orang tua dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat mengantar dan menjemput peserta didik ke sekolah, dan tidak semua orang tua mengizinkan anaknya untuk melaksanakan PTMT. Solusi yang dijalankan adalah sosialisasi tentang penerapan prokes dari rumah, diperjalanan, dan pulang sekolah kepada orang tua, mengingatkan peserta didik agar selalu menghimbau orang tua untuk tetap prokes, dan melaksanakan gabungan pembelajaran antara BDR dan PTM.
  
5. Kesiapan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, antara lain, sebagai berikut:
  - a) bersama Kemendikburistek telah menandatangani MOU pada Januari 2020 sebagai bentuk Komitmen Kesiapan Pemerintah Deli Serdang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai episode ke-7 program merdeka belajar. Komitmen bersama tersebut berisi: tidak memutasi Kepala Sekolah Penggerak untuk jangka waktu 3 tahun dan mendukung PSP dengan sharing pendanaan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan GTK.
  - b) Konsekwensi dari MoU tersebut adalah ditetapkannya Deli Serdang sebagai Sasaran PSP angkatan I bersama 5 kabupaten/kota lainnya di Sumut, dan dari 52 kepala sekolah yang dinyatakan lulus seleksi hanya 39 sekolah yang diikutsertakan sebagai sasaran PSP. Saat ini sudah sampai pada tahap Loka Karya 7 yang diikuti 38 sekolah Karena 1 SD swasta mengundurkan diri sebab alasan internal yayasan. Untuk tahap II sebanyak 70 sekolah dinyatakan lulus seleksi, tapi hanya 21 sekolah yang ditetapkan sebagai sasaran PSP karena keterbatasan kuota. Melalui Dinas pendidikan Pemkab memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sapsras sekolah penggerak dan menganggar melalui APBD.
  
6. Permasalahan pelaksanaan PSP, antara lain: (1) keterbatasan sarana dan prasarana digital untuk digitalisasi sekolah. Sangat membutuhkan dukungan APBN dalam pengadaan komputer dan jaringan internet secara memadai,

mengingat dampak pandemi; (2) kekurangan jumlah guru yang berstatus ASN. Kekurangan guru ASN telah diupayakan melalui penerimaan PPPK JF Guru dari 2.806 formasi tahun 2021 telah lulus seleksi dan telah diterbitkan SK PPPK dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1.784 orang. Namun mengalami kesulitan untuk penggajiannya disebabkan komitmen Pemerintah Pusat dalam berbagai Rapat Koordinasi lintas Kementerian terkait bahwa untuk Gaji Pokok PPPK dari Pemerintah Pusat sedangkan untuk aneka tunjangan dari Pemerintah Daerah namun kenyataannya menjadi beban APBD.

7. Koordinasi yang dilakukan terkait Program Sekolah Penggerak adalah (1) rapat Tim PMO daerah bersama Kemendikbudristek, LPMP, BPPAUD dan PPPPTK IPA Bandung-selaku wali PSP utk identifikasi permasalahan PSP di satuan pendidikan dan upaya untuk mencari solusinya secara bersama sama sesuai dengan kewenangannya masing masing; dan (2) kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021, Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPMP Sumut, Kepala BP PAUD dan Dikmas Provsu, Koordiantor Pelatih Ahli P4TK IPA, seluruh kepala sekolah penggerak dan pengawas Penggerak.

### **III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

1. Bupati Kabupaten Deli Serdang, H. Ashari Tambunan menyampaikan sambutan, sebagai berikut:
  - a) Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten terbesar di Sumatera Utara, dengan luas wilayah 2.497,72 km<sup>2</sup>, terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.931.441 jiwa, dan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Perpres 62 Tahun 2011.
  - b) Potensi pendidikan Kabupaten Deli Serdang, cukup besar, yaitu nomor dua di Sumatera Utara, setelah Kota Medan. Pada tahun 2022, jumlah sekolah di Kabupaten Deli Serdang mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK sebanyak 2.457 sekolah. Jumlah siswa 384.821 orang dan guru 24.202 orang
  - c) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan berbagai upaya untuk membangun pendidikan, dalam bentuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan, laboratorium, sanitasi sekolah, sarana utilitas sekolah, rehabilitasi ruang kelas sekolah, dan sebagainya. Namun masih banyak sekolah yang harus diperbaiki. Masih memerlukan dukungan dana alokasi khusus untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik sekolah. Memerlukan bantuan sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mewujudkan digitalisasi sekolah dan pembelajaran.
  - d) Inovasi bidang pendidikan telah berhasil mendapat penghargaan, diantaranya dari KemenpanRB, adalah Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 (230 besar nasional) menunggu pengumuman Top 99, yang akan diumumkan tanggal 13 Juni 2022.

- e) Deli Serdang merasakan dampak pandemi pada semua sektor kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Kebijakan membuka dan menutup sekolah mengacu kepada SKB 4 Menteri dan Tim Gugus Tugas Covid Kabupaten. Pembelajaran di masa pandemi Covid 19, dilaksanakan melalui tiga strategi, yaitu pembelajaran daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan *home visit* (kunjungan rumah).
- f) Saat ini pembelajaran tatap muka sudah dilakukan 50% dari jumlah siswa, karena sudah berada pada zona hijau, wabah Covid-19 semakin menurun, dan persentase siswa dan guru yang sudah divaksin sudah di atas 90%. Tahun pelajaran 2022/2023, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- g) Terkait implementasi Sekolah Penggerak, Deli Serdang menjadi pilot proyek sekolah penggerak. pada angkatan pertama sebanyak 38 sekolah dan angkatan ke dua di 21 sekolah. Program Sekolah Penggerak sudah diimbaskan pada 714 SD dan 324 SMP, dengan jumlah guru yang mendapatkan manfaat 3.114 orang.
- h) Kepala sekolah, guru, dan pemerintah, siap melaksanakan program sekolah penggerak, namun mengharapkan dukungan alat TIK untuk menciptakan digitalisasi sekolah, sebagai salah satu kebutuhan implementasi sekolah penggerak.

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Yudy Hilmawan, MM, menyampaikan paparan antara lain:

- a) Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, berikut data Pendidikan tahun 2022:

Jenjang	Lembaga sekolah			Siswa			Guru		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
PAUD	32	909	941	854	26.961	27.815	133	3.023	3.156
SD	581	640	921	126.127	69.252	195.379	7.749	3.747	11.496
SMP	63	270	333	34.664	46.830	81.494	2.327	2.804	5.131
SMA	21	115	136	16.582	19.417	35.999	956	1.113	2.069
SMK	11	115	126	10.791	33.343	44.134	730	1.620	2.350
<b>TOTAL</b>			<b>2.457</b>			<b>384.821</b>			<b>24.202</b>

- b) Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, berikut data ruang kelas:

No	Tingkat	Jumlah Rombel	Ruang Kelas	Kekurangan Ruang Kelas
1	SD	8.052	7.556	495
2	SMP	3.059	3.009	50
3	PAUD	2.857	2.656	201
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.968</b>	<b>13.221</b>	<b>747</b>

- c) Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, berikut data kondisi ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium:

Tingkat	Kondisi Ruang Kelas											
	Baik			Rusak Ringan			Rusak Sedang			Rusak Berat		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
SD	1.945	1.663	3.608	2.567	1.026	3.595	251	101	352	1	-	1
SMP	311	1.199	1.510	789	573	1.363	48	89	137	-	-	-
PAUD	78	1.449	1.527	28	1.032	1.060	5	64	69	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.334</b>	<b>4.311</b>	<b>6.645</b>	<b>3.384</b>	<b>2.633</b>	<b>6.017</b>	<b>304</b>	<b>254</b>	<b>558</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

- d) Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, berikut data kondisi perpustakaan:

Tingkat	Jumlah Sekolah	Perpustakaan			Kekurangan Perpustakaan
		Negeri	Swasta	Total	
SD	925	495	187	682	243
SMP	333	58	229	287	46
<b>Jumlah</b>	<b>1.258</b>	<b>553</b>	<b>416</b>	<b>969</b>	<b>289</b>

- e) Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, berikut data kondisi laboratorium IPA:

Tingkat	Jumlah Sekolah	Laboratorium IPA			Kekurangan Lab. IPA
		Negeri	Swasta	Total	
SD	925	18	58	76	36
SMP	333	70	157	227	106
<b>Jumlah</b>	<b>1.258</b>	<b>88</b>	<b>215</b>	<b>303</b>	<b>142</b>

- f) Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, berikut data kondisi laboratorium bahasa dan laboratorium komputer:

Tingkat	Jumlah Sekolah	Ada Laboratorium Bahasa	Kekurangan Lab. Bahasa	Ada Laboratorium Komputer	Kekurangan Lab. Komputer
SD	925	-	-	-	-
SMP	333	45	288	288	124
<b>Jumlah</b>	<b>1.258</b>	<b>45</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>124</b>

- g) Program Merdeka Belajar di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- 1) Program Sekolah Penggerak:

- PAUD : 23 Sekolah
- SD : 23 Sekolah
- SMP : 13 Sekolah
- SMA : 25 Sekolah

- 2) Sasaran Program Guru Penggerak

JENJANG	ANGKATAN I	ANGKATAN II	ANGKATAN IV
PAUD	1 Orang	-	1 Orang
SD	27 Orang	4 Orang	45 Orang
SMP	5 Orang	5 Orang	36 Orang

- 3) Pengimbasan

- PAUD : 69 Sekolah
- SD : 43 Sekolah
- SMP : 36 Sekolah

- 4) Sekolah Sasaran Program Kampus Mengajar sebanyak 144 Sekolah.

- h) Inovasi bidang pendidikan telah berhasil mendapat penghargaan, diantaranya dari KemenPANRB, sebagai berikut:

- 1) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, melalui inovasi program Cerdas: sebuah model pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Yaitu membangun pendidikan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan tiga pilar kekuatan: pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

- 2) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, melalui inovasi Opung Sari Basah Bang: mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan gerakan Deli Serdang Berseri (bersih, rapi, sejuk, rindang, dan indah). Opung Sari Basah Bang itu merupakan akronim dari: Operasi Pungut Sampah Setiap Hari, Bank Sampah Sekolah dan Pembinaan Berjenjang), yaitu inovasi untuk mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan dan gerakan Deli Serdang Berseri.
  - 3) Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, melalui inovasi: Program Cerdas, Opung Sari Basah Bang, Mesra Bertuah: mewujudkan Desa Satu (Deli Serdang Sekolah Bermutu). Merupakan kolaborasi tiga inovasi, Cerdas (gotong royong membangun pendidikan), Opung Sari Basah Bang (strategi pengelolaan sekolah berwawasan lingkungan) dan Mesra Bertuah (strategi pengelolaan sekolah ramah anak) untuk mewujudkan Deli Serdang Sekolah Bermutu.
  - 4) Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, melalui inovasi: Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas: sebuah model pemberdayaan anak-anak marjinal di bidang pendidikan. Kas Anak Kasir akronim dari: Kembali Bersekolah Anak Kawasan Pesisir. Kas Anak Pelorena akronim dari: Kembali Bersekolah Anak Penghuni Loka Rehabilitasi Narkoba. Kas Anak Lapas akronim dari: Kembali Bersekolah Anak Penghuni Lembaga Perumahan. Inovasi ini bagian dari gerakan kembali bersekolah.
  - 5) Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 (230 besar nasional) menunggu pengumuman Top 99, yang akan diumumkan tanggal 13 Juni 2022, melalui inovasi: Kas Anak Kasir, Anak Pelorena, Anak Lapas, Anak Panji, Anak Kasir Mengaji: sebuah model pemberdayaan anak-anak marjinal di bidang pendidikan. Pengembangan inovasi tahun 2021, yang diperkaya dengan inovasi anak panti asuhan mengaji dan anak kawasan pesisir mengaji.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan antara lain, bahwa Program Merdeka Belajar telah dilaksanakan untuk beberapa episode. Namun, belum ada dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga sifatnya berupa kegiatan saja. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan terkait dasar hukum Merdeka Belajar ini, misalnya dalam Revisi Undang-Undang Pendidikan yang saat ini sedang digagas oleh Kemendikbudristek RI.
  4. Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyampaikan beberapa masukan antara lain sebagai berikut:
    - a) Apresiasi terhadap Pemkab Deli Serdang terkait pengelolaan guru honorer menjadi P3K, dimana terdapat guru honorer sekitar 1.700-an orang. Beberapa kendala yang ada, adalah sudah ada yang lolos P3K namun belum ada SK atau sudah dapat SK tapi belum ada gaji. Tidak ada kejelasan soal pengelolaan Guru Honorer ini hingga sekarang. Perlu kejelasan.
    - b) Terdapat permintaan dari NGO terkait penggunaan dana BOS. Hal ini perlu diperjelas penggunaannya.

5. Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek RI, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd. menyampaikan antara lain, bahwa kerusakan bangunan sekolah, pemenuhan kebutuhan sarpras pendidikan lainnya, didasarkan pada data Dapodik. Oleh karena itu sekolah dan Pemkab Deli Serdang Perlu selalu mengupdate Dapodiknya, termasuk data kerusakan dan kebutuhan sarpras. Namun, meskipun data sarpras sudah ada, masih perlu disinkronisasi dengan data milik PUPR, karena PUPR-lah yang akan memenuhi dan melaksanakan perbaikan sekolah atau ruang rusak. Harus sinkron kedua data tersebut. Hal ini juga berlaku pada kebutuhan TIK sekolah. Anggaran rehabilitasi dan TIK di Kab Deli Serang tahun ini sebanyak Rp.9,7 Miliar.
6. Masukan dari Anggota Komisi X DPR RI, antara lain disampaikan oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., Prof. Dr. Djohar Arifin Husin, Dr. H.A. Mujib Rohmat, Elnino M. Husein, S.T, M.Si, dan Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi sebagai berikut:
  - a) Mengelola pendidikan tidak seperti memperbaiki jembatan rusak. Jika pendidikan rusak maka generasi berikutnya akan gagal.
  - b) Pendidikan saat ini tidak seperti berbeda dengan masa lalu. TIK sangat dibutuhkan. Oleh karena itu selain pemenuhan fasilitas, pendidik juga harus paham memanfaatkannya. Misalnya ada pelatihan *coding* (pembuatan *game*) untuk anak yang harus dipahami.
  - c) *Mindset* pengelolaan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer, saat ini adalah anggapan bahwa mereka adalah pencari kerja. Maka perlakuan GTK honorer ini oleh Pemerintah harus dirubah. GTK honorer adalah sudah mengabdikan puluhan tahun dan butuh pengakuan Pemerintah, bukan pencari kerja.
  - d) Terkait permasalahan guru yang sudah lulus P3K dan belum mendapat gaji, Komisi X DPR RI akan membuat Panja ketiga, terkait desakan kepada Pemerintah agar SK segera turun dan segera digaji.
  - e) Pelaksanaan Program Guru Penggerak, jangan sampai justru menjadikan guru terkotak dalam kasta-kasta (kastanisasi guru). Misalnya guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih, menjadi superior dibanding guru yang minim ketrampilan dan terbatas.
  - f) Saat ini DPR RI tengah membahas RAPBN 2023, diharapkan akan ada peningkatan anggaran pendidikan sehingga tahun 2023 dapat lebih baik pengelolaannya.
  - g) Terkait pelaksanaan Program Merdeka Belajar yang belum ada payung hukumnya, oleh Komisi X DPR RI dianggap hanya sebagai *project pioneer*. Kemdikbudristek RI belum menyerahkan draf RUU Pendidikan yang disusunnya kepada Komisi X DPR RI meskipun masyarakat telah tersosialisasi adanya revisi UU SKN tersebut oleh Kemdikbudristek.

#### IV. KESIMPULAN

1. Selama masa pandemi Covid-19, Pemprov Deli Serdang melakukan proses pembelajaran daring (dalam jaringan), luring (luar jaringan), dan *home visit* (kunjungan rumah). Strategi mengatasi *learning loss* dilakukan melalui kurikulum darurat, pembelajaran dengan pendalaman materi pokok, menciptakan suasana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, dan melakukan penilaian berbasis literasi dan numerasi.

2. Dalam pelaksanaan PTM, telah dilakukan penyusunan SOP Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi. Kendala yang ditemui dalam rencana PTM, antara lain kurangnya kesadaran orang tua dalam menerapkan protokol kesehatan pada saat mengantar dan menjemput peserta didik ke sekolah dan tidak semua orang tua mengizinkan anaknya untuk melaksanakan PTMT.
3. Telah melakukan kegiatan Program Sekolah Penggerak, antara lain bersama Kemendikbudristek telah menandatangani MoU pada Januari 2020 sebagai bentuk Komitmen Kesiapan Pemerintah Deli Serdang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai episode ke-7 program merdeka belajar. Permasalahan pelaksanaan PSP, antara lain: (1) keterbatasan sarana dan prasarana digital untuk digitalisasi sekolah. Sangat membutuhkan dukungan APBN dalam pengadaan komputer dan jaringan internet secara memadai, mengingat dampak pandemi; (2) kekurangan jumlah guru yang berstatus ASN.
4. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan berbagai upaya untuk membangun pendidikan, dalam bentuk membangun Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan, laboratorium, sanitasi sekolah, sarana utilitas sekolah, rehabilitasi ruang kelas sekolah, dan sebagainya. Namun masih banyak sekolah yang harus diperbaiki. Diantaranya yaitu: (1) kekurangan ruang kelas untuk PAUD, SD dan SMP sebanyak 747 ruang kelas, (2) membutuhkan 289 perpustakaan, 142 laboratorium IPA, 228 Laboratorium Bahasa, dan 124 Laboratorium Komputer.
5. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kab Deli Serang, terdapat 2.457 sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK), dengan jumlah siswa 384.821 orang dan 24.202 guru. Terdapat 1.700-an GTK honorer yang bekerja di Kab Deli Serdang. Beberapa kendala GTK honorer yang ada, adalah sudah ada yang lolos P3K namun belum ada SK atau sudah dapat SK tapi belum ada gaji. Tidak ada kejelasan soal pengelolaan Guru Honorer ini hingga sekarang.
6. Inovasi bidang pendidikan telah berhasil dilakukan, antara lain mendapatkan penghargaan diantaranya dari KemenpanRB, adalah Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 (230 besar nasional) menunggu pengumuman Top 99, yang akan diumumkan tanggal 13 Juni 2022.

## **V. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, Pemprov Sumatera Utara dan Pemkab Deli Serdang untuk berkoordinasi dalam validitas data pokok pendidikan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kebutuhan ruang kelas baru, perbaikan sekolah/ruang kelas rusak, pemenuhan perpustakaan dan laboratorium, dan kebutuhan TIK.
2. Komisi X DPR RI akan membentuk Panja Ketiga tentang GTK Honorer, terutama terkait desakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan

permasalahan GTK honorer yang lolos P3K namun belum mendapatkan SK, dan/atau sudah mendapatkan SK namun belum memperoleh gaji.

## **VI. PENUTUP**

Demikian laporan ini Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 16 Juni 2022

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Ttd.

**Agustina Wilujeng P., S.S., M.M.**  
**A-185**